

**PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO PROYEK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.5 TAHUN 2020
STUDI KASUS: PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**ELECTRONIC-BASED GOVERNANCE SYSTEM PROJECT DESIGN
MANAGEMENT BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF MINISTRY OF STATE APARATURE AND BUREAUCRATIC REFORM NO.5 YEAR 2020
CASE STUDY: PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**

Irma Nina Fauziah Ritonga¹, Lukman Abdurrahman², Rahmat Mulyana³
^{1,2,3}Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom
irmaninafr@student.telkomuniversity.ac.id, abdural@telkomuniversity.ac.id,
rahmatmoelyana@telkomuniversity.ac.id,

Abstrak

Dengan kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan SPBE ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk menerapkan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dengan melakukan penilaian terhadap risiko seperti mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko. Penulis menggunakan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk Perancangan manajemen Risiko pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu penulis juga menggunakan ISO 31000 dan COBIT 5 *for Risk* sebagai acuan ataupun referensi mengenai Manajemen Risiko. Pada penelitian ini terdapat dua jenis risiko yaitu risiko positif dan risiko negatif yang mana hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi personil, proses dan teknologi. Rekomendasi personil berupa penambahan pelatihan dasar dan penambahan deskripsi kerja. Rekomendasi untuk aspek proses berupa penambahan kebijakan dan SOP Pelatihan. Dan rekomendasi untuk aspek teknologi berupa *tools Service Desk*.

Kata kunci : SPBE, Manajemen Risiko, ISO 31000, COBIT 5 *for Risk*, Permen PANRB

Abstract

With the presence of Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) is expected to realize good governance. With this SPBE, it is also expected to improve the quality of public services and increase community participation in the implementation of development. In West Bandung Regency Government to implement and develop this Electronic-Based Government System (SPBE) by evaluating risks such as identifying risks and analyzing risks. The author uses the Permanent PANRB Number 5 of 2020 as a guide for the design of risk management in West Bandung Regency Government. In addition the authors also use ISO 31000 and COBIT 5 for Risk as a reference or reference regarding Risk Management. In this study, there are two types of risk, namely positive risk and negative risk which results from this research are in the form of personnel, process and technology recommendations. Personnel recommendations include adding basic training and adding job descriptions. Recommendations for process aspects include the addition of policies and training SOPs. And recommendations for technological aspects in the form of Service Desk tools.

Keywords: SPBE, Risk Management, PANRB, ISO 31000, COBIT 5 *for Risk*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi suatu informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi computer (software & hardware) yang digunakan untuk proses atau penyimpanan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999).

Teknologi informasi yang biasanya digunakan perusahaan untuk membantu dalam mengelola data. Pengelolaan data yang dilakukan untuk mengubah data, menambahkan data, menghapus data, dan mencari data

yang diperlukan. Dengan teknologi informasi pengelolaan suatu data akan lebih mudah dilakukan dan akan mempercepat pekerjaan. Ada beberapa perusahaan yang terkadang tidak peduli dengan risiko yang akan terjadi pada teknologi informasi yang digunakan tersebut. Menurut Herman Darwami risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Dengan adanya risiko ini dapat menghambat berjalannya bisnis pada perusahaan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri.

Manajemen Risiko merupakan suatu proses antisipasi terhadap risiko agar tidak terjadi kerugian pada sebuah perusahaan atau organisasi. Stoneburner et.al berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengurangi dampak risiko ke level yang dapat diterima organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam konteks TI proses manajemen risiko yang efektif. Framework manajemen risiko teknologi informasi yang merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengatasi berbagai risiko terkait penggunaan teknologi informasi, ada beberapa acuan yang akan menjadi landasan dalam membuat framework diantaranya adalah COBIT, OCTAVE, ITIL, NIST, dan lain-lain.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang biasa dikenal dengan (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu tata kelola dan manajemen sistem pemerintah berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk SPBE ini bukan hanya penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan pada suatu instansi pemerintahan. SPBE memiliki beberapa domain salah yaitu Domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Pada Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Selanjutnya pada Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenn PANRB) Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 sebagai pedoman yang digunakan dalam Perancangan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tugas Akhir ini. Dan kerangka kerja yang digunakan yaitu ISO31000:2018 dan COBIT 5 *for Risk* yang digunakan sebagai referensi tambahan oleh penulis. Dengan kedua kerangka kerja tersebut yang digunakan penulis sebagai panduan dan penilaian dalam proses perancangan Manajemen Risiko di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Dengan ini dilakukan penelitian terkait dengan perancangan Manajemen Risiko SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar dapat memberikan rekomendasi dari 3 (Tiga) Aspek yaitu Personil, Proses dan Teknologi berdasarkan dari tingkat risiko yang harus ditangani. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam perkembangan SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan analisis risiko proyek SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana melakukan perancangan penanganan risiko proyek di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana melakukan perancangan solusi dari aspek personil, proses, dan teknologi untuk menangani risiko yang tidak bisa ditoleransi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Menghasilkan analisis risiko SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman Manajemen Risiko SPBE
2. Menghasilkan rencana penanganan risiko proyek pada SPBE Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,
3. Menghasilkan rancangan solusi dari aspek personil, proses, dan Teknologi untuk menangani risiko yang tidak bisa ditoleransi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini antara lain:

1. Dapat Memberikan informasi mengenai risiko-risiko penting yang mungkin terjadi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
2. Dapat memberikan rancangan penilaian terhadap risiko di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,
3. Dapat memberikan rekomendasi rancangan untuk penanganan risiko pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4. Dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang manajemen risiko IT SPBE.

2. Landasan Teori

2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE, seperti yang telah tertuang didalam Perpres No. 95 Tahun 2018 ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparent, dan akuntable serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.

2.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi risiko tertentu (Hanafi dalam Purnama, 2014). Manajemen risiko merupakan upaya manajemen untuk mengendalikan risiko pada kegiatan operasional perusahaan, dengan melakukan analisis risiko, evaluasi risiko, serta rencana penanggulangannya (Berg, 2010). Manajemen risiko memungkinkan praktisi untuk menanggapi risiko yang telah diketahui, untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi selanjutnya dan dapat dikembangkan rencana respon yang sesuai untuk mengatasi risiko – risiko potensial tersebut (Williams, 1993).

2.3 Manajemen Risiko TI

Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negative yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi atau perusahaan.

2.4 Smart City

Smart City adalah suatu langkah yang hebat untuk memajukan sebuah kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kementerian Dalam negeri dalam sebuah paparannya mengartikan *Smart City* sebagai sebuah konsep penataan kota dalam negeri agar terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perencanaan dan perkembangan kota yang layak huni, kota yang maju dan modern, serta dapat meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan mejudkan untuk membangun fondasi Indonesia yang *smart nation*.

2.5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang digunakan sebagai pedoman Manajemen Risiko SPBE di Pemerintahan. Dengan adanya Permen PANRB ini dapat sebagai dasar yang kuat untuk perancangan manajemen risiko dan pengambilan keputusan terhadap risiko pada pemerintahan tersebut.

2.6 COBIT 5 for Risk

Pada umumnya risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari suatu probabilitas suatu peristiwa dan konsekuensi. COBIT 5 for Risk merupakan sebagai pendukung utama dari kerangka kerja COBIT 5 untuk fungsi risiko.

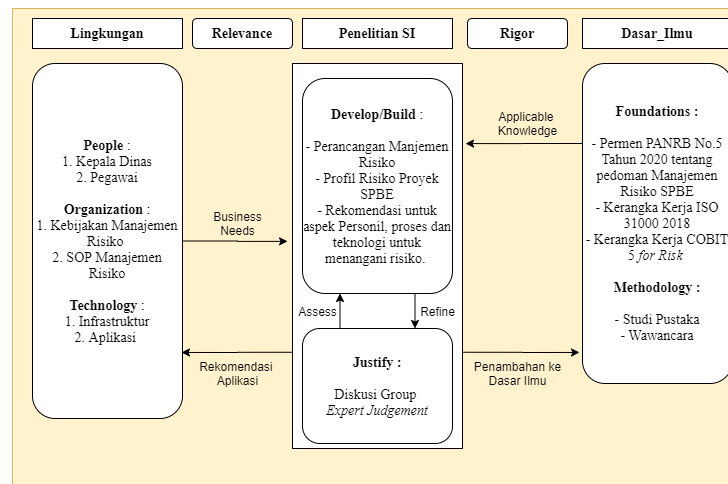
2.7 ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 adalah suatu panduan dalam penerapan manajemen risiko yang terdiri atas tiga elemen: prinsip (principle), kerangka kerja (framework), dan proses (process). Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi dari manajemen risiko. Kerangka kerja adalah suatu pengaturan sistem manajemen risiko tersebut secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Dan proses adalah suatu aktivitas pengelolaan dari risiko yang berurutan dan saling terkait.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Model Konseptual

Dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan Model konseptual. Model konseptual ini merupakan suatu model yang menunjukkan hubungan logis antara faktor/variable yang diidentifikasi penting untuk menganalisis masalah penelitian (Sinulingga). Dengan adanya model konseptual ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang membantu proses penelitian Tugas Akhir ini.



4. Analisis Data

1.1. Analisis Data

Pada tahapan analisis data dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan pada tahapan pengumpulan data yang mana data tersebut yang akan dibuat untuk perancangan manajemen risiko SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Bnadung Barat agar dapat memenuhi regulasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko.

1.2. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis risiko yang berisikan mengenai level kemungkinan dan level dampak untuk menetapkan besaran risiko SPBE yang didapat dalam bentuk angka.

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level risiko SPBE yang mana setiap level risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Pemilihan level risiko terdapat beberapa pilihan sesuai kebutuhan seperti 3 level, 4 level, 5 level atau Level Risiko SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas dari Risiko SPBE yang terjadi. Level Risiko SPBE dipaparkan dengan warna sesuai dengan preferensi masing masing.

Level Risiko	Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1 Sangat Rencah	1 – 5	Biru
2 Rendah	6 – 10	Hijau
3 Sedang	11 – 15	Kuning
4 Tinggi	16 – 20	Jingga
5 Sangat Tinggi	21 – 25	Merah

1.3. Selera Risiko

Selera Risiko SPBE yang bertujuan memberikan acuan untuk penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani baik itu risiko negatif ataupun risiko positif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan risiko tersebut harus ditangani atau tidak.

Besaran Risiko yang Harus Ditangani	
Risiko Positif	Risiko Negatif
≤ 10	≥ 10

1.4. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko SPBE yang diterapkan dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko ini yang bertujuan untuk mengetahui apa penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko Proyek yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan kerangka kerja ISO 31000 dan Permen PANRB sebagai panduan untuk perancangan Manajemen Risiko SPBE.

Pada proses identifikasi risiko pebulis menemukan 5 risiko negatif dan 4 risiko positif dapat dilihat seperti pada table dibawah yang telah di tulis sesuai dengan kategori masing masing risiko:

Kategori Risiko	Kriteria	Jumlah	ID Risiko	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko
Peta Rencana SPBE	Positif	1	P4	4	5	24
	Negatif	2	N1	2	3	11
			N5	2	1	2
Sumber Daya Manusia	Positif	3	P1	3	3	14
			P2	2	3	11
			P3	4	4	19
	Negatif	3	N2	3	3	14
			N3	4	3	16
			N4	2	2	7

Dari Jumlah risiko yang telah disesuaikan dengan level kemungkinan dan level dampak serta telah didapatkan hasil besaran risikonya yang selanjutnya disesuaikan dengan selera risiko agar dapat diketahui risiko mana yang harus ditangani dan risiko mana yang tidak ditangani serta diurutkan berdasarkan prioritas, maka didapatkan hasil seperti tabel dibawah yang akan di olah lebih lanjut pada bab perancangan:

ID Risiko	Prioritas Risiko	Jenis Risiko SPBE	Terkait dengan Risiko	Kejadian	Opsi Penanganan
N3	1	Negatif	Adanya ketergantungan pada staf TI utama.	Sistem yang digunakan seperti website, aplikasi presisi dan Akur tidak berjalan dengan baik.	Mitigasi
N2	2	Negatif	Tidak ada keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.	staff yg masih kurang paham tentang jaringan	Mitigasi
N1	3	Negatif	Sumber daya penting tidak dialokasikan dan dikelola dengan efisien serta tidak selaras dengan prioritas pemerintahan	Anggaran dana atau alokasi dana dari pemerintah belum memenuhi	Transfer

5. Perancangan

5.1. Rencana Penangan Risiko

Rencana perancangan rekomendasi yang dibuat untuk memberikan konsep rancangan rekomendasi Manajemen Risiko SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang diperoleh dari hasil analisis. Rekomendasi ini

dibuat berfokus pada *people, process, technology*.

Aspek	Rekomendasi	Deskripsi
Personil	Penambahan Pelatihan Dasar	Melakukan pelatihan untuk pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan.
	Penambahan Deskripsi Kerja	Melakukan penambahan deskripsi kerja pada bidang terkait.
Proses	Penyusunan Kebijakan Pengeluaran Dana	Menyusun kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran dana yang digunakan.
	Penyusunan SOP Pelatihan	Menyusun SOP untuk prosedur pelatihan
	Penyusunan Kebijakan Penggunaan Aplikasi	Menyusun Kebijakan yang mengatur tentang penggunaan perangkat TIK yang ada.
Teknologi	Rekomendasi <i>tools: Helpdesk</i>	Sebagai alat komunikasi untuk pelaporan atau pengaduan terkait masalah sistem yang sedang terjadi.

Setelah melakukan perencanaan risiko maka selanjutnya membuat *roadmap* implementasi rekomendasi ini dibuat untuk meletakkan prioritas rekomendasi berdasarkan waktu yang akan digunakan sebagai acuan untuk proses penerapan rekomendasi penangan risiko pada pemerintahan tersebut

No	Rekomendasi	Periode						
		2020		2021				
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	
<i>Aspek People</i>								
	Penambahan Pelatihan Dasar							
	Penambahan Deskripsi Kerja							
<i>Aspek Process</i>								
	Penyusunan Kebijakan Pengeluaran Dana							
	Penyusunan SOP Pelatihan							
	Penyusunan Kebijakan Penggunaan Aplikasi							
<i>Aspek Technology</i>								
	Rekomendasi <i>Fitur Helpdesk</i>							

5.2. Perancangan Solusi Personil

Bentuk rekomendasi aspek personil yang di rekomendasikan yaitu penambahan pelatihan dasar dan deskripsi kerja. Berikut tabel rekomendasi untuk rekomendasi aspek personil.

Kompetensi	Rekomendasi	Target
Kemampuan dasar untuk mengoperasikan aplikasi yang sedang digunakan.	Diadakannya pelatihan dasar mengenai cara pengoperasian aplikasi-aplikasi yang akan digunakan.	Pengguna aplikasi
Kemampuan untuk menggunakan aplikasi baru yang ada.	Diadakannya sosialisasi serta pelatihan untuk aplikasi yang akan di gunakan pemerintahan.	Seluruh pegawai
Kemampuan dalam pemakaian dan perawatan perangkat TIK yang ada.	Diadakannya sosialisasi untuk pemakaian dan perawatan suatu perangkat serta diberikan buku panduan untuk tatacara perawatan serta pemakaian perangkat yang ada.	Seluruh pegawai

Selanjutnya untuk penambahan deskripsi kerja digambarkan pada tabel berikut ini:

Deskripsi Kerja	Target
Melakukan pengujian sistem serta mengikuti pelatihan untuk penggunaan aplikasi.	Bidang Aptika dan pegawai pengguna aplikasi.
Melakukan pengecekan untuk aplikasi baru yang akan digunakan dan mengikuti sosialisasi mengenai tata cara pengoperasian perangkat ayng akan digunakan.	Bidang Aptika dan pegawai pengguna aplikasi.

5.3. Perancangan Rekomendasi Proses

Adapun bentuk rekomendasi untuk aspek proses ini berupa kebijakan pengeluaran dana, kebijakan penggunaan aplikasi dan sop pelatihan. Berikut tabel rekomendasi kebijakan

Kebijakan Target	Rekomendasi Kebijakan
Draft Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pasal 54	Ayat 2 : Semua dana yang masuk wajib tercatat untuk mengetahui jumlah dana yang dapat digunakan Ayat 3: Semua pengeluaran wajib tercatat untuk mengetahui jumlah dana yang keluar atau digunakan. Ayat 4: Membuat perancangan dana yang akan dibutuhkan sebelum pemerintahan tersebut berjalan.
Draft Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pasal 26	Ayat 4: Melakukan pengembangan aplikasi lama dan pembuatan aplikasi baru harus melakukan sosialisasi serta pelatihan terlebih dahulu.

Selanjutnya untuk rekomendasi SOP digambarkan pada tabel dibawah :

SOP	Deskripsi	Target
SOP Pelatihan	SOP yang berisikan langkah – langkah untuk seluruh pegawai yang akan mengikuti pelatihan	Seluruh Pegawai yang menggunakan aplikasi

5.4. Rekomendasi Aspek Teknologi

Adapun bentuk rekomendasi dari aspek teknologi ini berupa *tools* yang dapat digunakan atau diterapkan pada pemerintahan tersebut.

Fungsi	Rekomendasi <i>Tools</i>	Kegunaan
<i>Help Desk / Service Desk</i>	<i>Tools A, Tools B</i>	Digunakan sebagai alat komunikasi untuk pelaporan atau pengaduan terkait masalah sistem yang sedang terjadi.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

- Perancangan manajemen risiko Proyek SPBE di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat menggunakan pedoman Permen PANRB No 5 Tahun 2020 yang mana proses perancangan dilakukan dengan cara Identifikasi Risiko SPBE untuk mencari informasi mengenai risiko yang ada pada pemerintahan tersebut, Penilaian Risiko untuk melihat risiko mana yang harus di tangani terlebih dahulu melai proses pemilihan prioritas, dan penanganan yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang telah di prioritaskan sebelumnya. Dari proses tersebut menghasilkan penanganan yang diambil dan diputuskan untuk diterapkan.
- Perancangan penanganan manajemen risiko proyek di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan opsi penanganan yang telah ditentukan dan penanganan risiko tersebut diselesaikan dengan melakukan perancangan rekomendasi berdasarkan aspek personil, proses dan teknologi.
- Perancangan solusi dari aspek personil, proses, dan teknologi untuk menangani risiko pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan memeberikan suatu rekomendasi untuk menangani risiko yang ada. Adapun rekomendasi yang berikan penulis untuk aspek personil yaitu Penambahan Pelatihan Dasar, untuk aspek proses terdapat penambahan kebiasaan dan SOP, dan untuk aspek teknologi peneliti merekomendasikan *tools* yang dibutuhkan dilihat dari risiko yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul, R., & Sudamarwan, K. (2018). Evaluasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Perusahaan BUMN Menggunakan Standar COBIT 5 (Studi Kasus: PT TASPEN PERSERO). *Jurnal IT CIDA Vol. 4*
- [2] Mahardika, F. (2017). Manajemen Risiko Keamanan Informasi. *JPIT Vol 2*.
- [3] Negara, K. P. (2019). From spbe.menpan.go.id: <https://spbe.menpan.go.id/tentang>
- [4] PANRB. (2019). spbe.menpan.go.id/kebijakan. From <http://spbe.menpan.go.id/kebijakan>
- [5] Sandi, H. (2010). Implementasi Framework Manajemen Risiko Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. 2.